

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

**Nadya Ramadhani
Nursiam**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: nadyaramadhani4@gmail.com

ABSTRACT

Disclosure of company risk is disclosure that provides more qualitative information or risk information listed in the notes section of the financial statements in the annual report. The purpose of this study was to analyze the effect of profitability, board size, public share ownership and number of board meetings on the risk disclosure level of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Samples were obtained as many as 120 companies with a purposive sampling method for 3 years. The data analysis technique in this study is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that the size of the board of commissioners has an effect on risk disclosure. Meanwhile, profitability, public share ownership and the number of board meetings have no effect on risk disclosure.

Keywords: risk disclosure, profitability, board size, public ownership, board of commissioners

JEL classification: G32

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menjadi perhatian penting bagi pihak-pihak luar khususnya untuk para investor sebagai

sumber informasi mereka untuk mengetahui keadaan perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tergantung pada tingkat pengungkapan risiko dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pengungkapan informasi risiko perusahaan harus dilakukan secara berimbang, dalam arti informasi yang disampaikan bukan hanya informasi yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko perusahaan. Menurut Mubarak & Rohman (2013) dalam penelitian Endah & Meilani (2017) dijelaskan bahwa tersedianya pengungkapan risiko dapat membantu para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi melalui evaluasi informasi yang telah diungkapkan perusahaan dalam hal tingkatan-tingkatan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan adanya kondisi seperti di atas, segmen non-keuangan pada *annual report* menjadi salah satu informasi penting dan menjadi perhatian khusus bagi para investor. Hal ini disebabkan informasi – informasi non-keuangan dianggap mampu menjelaskan informasi dari sisi keuangan dalam suatu laporan keuangan yang tidak dapat diungkapkan.

Penelitian Ellili & Nobanee (2017) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pengungkapan risiko perusahaan (*CRD*) dalam laporan tahunan telah tumbuh menarik minat para peneliti dan praktisi. Sebenarnya, kesadaran tentang pentingnya pengungkapan risiko dimulai pada tahun 1998 ketika Institut memetakan *Accountants* di Inggris dan Wales (ICAEW) menerbitkan sebuah makalah diskusi bertajuk “Pel-

aporan Keuangan Proposal Risiko untuk Pernyataan Risiko Bisnis” di mana ada proposisi bahwa direktur mengungkapkan informasi manajemen risiko dalam laporan tahunan. Kemudian, telah lama berpendapat bahwa pengungkapan risiko terkait, antara lain untuk perbaikan manajemen risiko perusahaan. Semua perusahaan disarankan untuk mengungkapkan risiko mereka dalam rangka meningkatkan transparansi laporan keuangan mereka, meningkatkan kualitas keterbukaan mereka dan membantu arus dan calon investor dalam penilaian yang tepat dan keputusan ekonomi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdapat di pasal 4. Peraturan tersebut mengharuskan Bank untuk menyusun Laporan Tahunan yang sedikitnya mencakup jenis risiko dan potensi kerugian, dan penerapan manajemen risiko, paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. dalam rangka menciptakan disiplin pasar dan sejalan dengan perkembangan standar internasional.

Peraturan yang mengatur pengungkapan risiko telah tertera di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Surat edaran tersebut mengharuskan bank umum konvensional untuk menerapkan transparansi dan publikasi laporan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan risiko dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti profitabilitas, ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan jumlah rapat dewan komisaris, melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk bank di Indonesia seharusnya membuat perusahaan perbankan mempersiapkan laporan keuangannya dengan lebih transparan dan lebih dalam sehingga para pemangku kepentingan memiliki gambaran umum tentang kondisi perusahaan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan sebagai hubungan antara *agent* atau manajer perusahaan dan *principal* atau pemilik saham, teori agensi menjelaskan bahwa orang yang memiliki kepentingan adalah pemilik saham dan

manajer. Adanya hubungan yang sangat kuat antara pemilik saham dan manajer sering menimbulkan konflik yang disebut sebagai *agency problem* (Meilody & Suhendah, 2019). *Agency problem* diartikan sebagai masalah yang muncul ketika manajer menempatkan tujuan pribadi di atas tujuan pemegang saham. Salah satu permasalahan dari *agency problem* yaitu adanya asimetri informasi, penyediaan informasi mengenai risiko yang diungkapkan oleh manajemen dapat menguatkan kepentingan dan pertanggungjawaban perusahaan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mengurangi asimetri informasi tersebut.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* dikembangkan oleh Freeman (1984) dalam I. S. Putri & TDKW (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi hanya untuk mencapai tujuan pemiliknya saja namun juga harus dapat memberi manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Perusahaan dapat terdorong untuk memenuhi harapan *stakeholder* dengan diungkapkannya berbagai jenis informasi yang salah satunya informasi terkait risiko perusahaan, sedangkan para manajer dapat terdorong untuk mengungkapkan risiko secara transparan, memperbaiki dan menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*.

Teori Tata Kelola Perusahaan

Ho & Wong (2001) dalam penelitian Suhardjanto & Dewi (2011) mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggungjawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indikator utama standar tata kelola perusahaan dalam sebuah ekonomi. Teori tata kelola perusahaan dengan pengungkapan risiko saling berhubungan satu sama lain, yang mana perusahaan yang dapat mengelola perusahaan dengan baik maka akan mengantisipasi risiko yang sedang terjadi maupun risiko yang akan datang. Pengungkapan risiko yang disusun perusahaan akan diungkapkan secara gamblang karena tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik.

Teori Manajemen Risiko

Sarwono *et al.* (2018) dalam penelitian A. A. Putri & Nurbaiti (2019) menjelaskan bahwa Pengungkapan manajemen risiko dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang terdapat dan telah dike-

lola oleh suatu perusahaan atau pengungkapan yang dilakukan atas bagaimana tindakan suatu perusahaan dalam mengendalikan risiko yang akan berkaitan di masa mendatang. Praktik kecurangan pada laporan keuangan dapat diminimalisir dengan memonitor aktivitas manajemen sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengelola manajemen risiko dengan baik. Mengelola manajemen risiko dengan baik perlu dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Teori Pengungkapan Risiko

Dalam proses akuntansi, pengungkapan merupakan langkah akhir yang menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan maupun laporan non keuangan yang digunakan sebagai evaluasi untuk kinerja sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu Bank. Menurut Idroes (2011, 234) dalam Adiyanto (2018) yang menyatakan bahwa Pilar 3 Basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Alat penghubung yang menghubungkan manajer dengan para pemegang saham adalah pengungkapan risiko itu sendiri. Manajer harus paham terhadap teori keagenan, teori stakeholder, teori tata kelola perusahaan dan teori manajemen risiko untuk dapat membantu pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam memahami risiko yang terjadi dan bagaimana manajemen mengelola risiko tersebut. Manfaat pengungkapan risiko untuk perusahaan yaitu dapat mengamati risiko dan mendeteksi potensi masalah agar dapat dilakukan tindakan lebih awal sehingga masalah tersebut tidak terjadi.

Pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan risiko

Profitabilitas merupakan tujuan akhir atau hasil dari hubungan antara keputusan dan kebijakan, yang mana kinerja keuangan salah satunya profitabilitas dapat mengukur kinerja perusahaan. Tingkat profitabilitas juga memberikan gambaran prestasi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan profit bagi pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Tingginya tingkat profitabilitas dapat mengisyaratkan bahwa perusahaan

tersebut dapat mengelola risiko dengan baik. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih luas kepada *stakeholder*. Hipotesis dalam penelitian ini:

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko

Keefektifan berjalannya mekanisme perusahaan diindikasikan dengan besarnya ukuran dewan komisaris yang bisa mengurangi biaya perusahaan, ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menguatkan perusahaan, karena komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dibuat lebih praktis dibandingkan ukuran dewan komisaris yang lebih kecil. Jika jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan pengawasan terhadap pengambilan keputusan yang diambil direksi juga akan rendah (Setyarini, 2011) dalam Ramadhani *et al.* (2015). Sedangkan jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih dalam mengawasi praktik pengungkapan risiko agar tidak ada informasi yang disembunyikan (Mubarok, 2013) dalam Wicaksono & Adiwibowo (2017). Hipotesis dalam penelitian ini:

H₂: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan risiko

Kepemilikan saham publik merupakan pihak eksternal atau pihak yang berada di luar manajemen yang menginvestasikan modalnya pada perusahaan, kepemilikan saham publik mempunyai arti penting bagi perusahaan, karena pada umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. dalam arti semakin besar jumlah kepemilikan saham publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi perusahaan tersebut. Perusahaan yang jumlah sahamnya semakin besar tersebar pada pihak eksternal akan melakukan pengungkapan risiko perusahaan secara luas dan lengkap. Maka besar kecilnya jumlah kepemilikan saham publik, perusahaan akan memberikan informasi mengenai pengungkapan risiko yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan para pemegang sahamnya. Hipotesis dalam penelitian ini:

H₃: Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap

pengungkapan risiko

Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko

Berdasarkan asumsi teori agensi, makin sering atau frekuensi rapat dewan komisaris semakin besar, diharapkan kinerja pengontrolan dapat dilakukan secara efektif. Kinerja tersebut akan dapat memberikan tekanan dan dorongan bagi manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dengan baik, transparan dan relevan sehingga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini:

H₄: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel terdiri dari anggota populasi terpilih, dengan kata lain tidak semua elemen populasi dapat dijadikan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut: 1) Bank umum konvensional yang mempublikasikan *annual report* pada tahun 2017, 2018, dan 2019 pada website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga website perusahaan masing-masing.; 2) Bank umum konvensional yang memiliki *annual report* lengkap pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan data-data lengkap yang terkait dengan variabel penelitian.

Berdasar pengumpulan data yang telah dilakukan terdapat 45 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasar data 45 perusahaan perbankan yang terdaftar, 3 perusahaan di antaranya merupakan bank syariah. Sedangkan 2 perusahaan lainnya telah di *delisting* dari BEI di tahun 2019, sehingga terdapat 40 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria setiap tahunnya, dimulai pada tahun 2017 hingga 2019, apabila dijumlahkan akan menjadi 120 data sampel perusahaan perbankan yang akan diolah.

Tingkat *corporate risk disclosure* diukur dengan menggunakan teknik skoring. Skor 1 diberikan untuk item risiko yang diungkapkan oleh perusahaan dan 0 bagi item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan risiko dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRD = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{(Total item pengungkapan risiko)}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRD: *Corporate Risk Disclosure*

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang membandingkan laba setelah pajak dengan total aset dengan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total item pengungkapan risiko}} \times 100\%$$

Jumlah anggota dewan komisaris dipresentasikan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, baik dewan komisaris independen maupun tidak independen dihitung sebagai pengukuran dari penelitian ini. Hal ini sesuai dengan jumlah anggota dewan komisaris yang tercatat dalam laporan tahunan periode 2017, 2018, dan 2019.

Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini ditentukan dengan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak publik. Jumlah saham publik tersebut adalah jumlah saham publik yang diungkapkan oleh setiap bank pada *annual reportnya* pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Indikator yang digunakan dalam menentukan jumlah rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun dalam *annual reportnya* pada periode 2017, 2018 dan 2019.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Model dalam penelitian ini adalah:

$$CRD = \beta_0 + \beta_1 PROFIT + \beta_2 SIZE + \beta_3 KP + \beta_4 RDK + e$$

Keterangan:

- CRD = *Corporate Risk Disclosure*
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi Variabel Independen
- PROFIT = *Profitabilitas*
- SIZE = Ukuran Dewan Komisaris
- KP = Kepemilikan Saham Publik
- RDK = Rapat Dewan Komisaris
- e = Residual

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berdasarkan nilai koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,143 yang

artinya 14,3% dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan pengujian

asumsi klasik regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficients	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,618	18,187	0,000	
Profitabilitas	0,532	0,762	0,447	Tidak Signifikan
Ukuran Dewan Komisaris	0,023	3,367	0,001	Signifikan
Kepemilikan Saham Publik	0,097	1,270	0,207	Tidak Signifikan
Jumlah Rapat Dewan Komisaris	0,001	0,481	0,632	Tidak Signifikan
Fhitung			5,946	
R ²			0,171	
Adjusted R ²			0,143	
Sig.			0,000 ^b	

PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,059 > level of significant sebesar 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa *Value Inflation Factors (VIF)* antara 1,171-1,447 (di bawah 10) dan *tolerance value* antara 0,691-0,854 (di bawah 1) sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *spearman rho* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* diperoleh nilai 1,793 berada di antara $du < d < 4-du$ yaitu $1,7715 < 1,793 < 2,2285$, sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi antarvariabel dalam penelitian ini.

Hasil pengujian profitabilitas didapatkan nilai signifikan sebesar 0,447 > 0,05, maka H₁ ditolak, dari penelitian ini dapat dilihat pada Bank JTrust Indonesia Tbk. yang memiliki rasio ROA -2,3% pada tahun 2018 yang dapat mencapai nilai pengungkapan risikonya sebesar 90%, begitu pula dengan Bank Harda Internasional Tbk. dan Bank Yudha Bhakti Tbk. yang memiliki rasio ROA masing-masing -5,4% dan -3% pada tahun 2018 yang dapat mencapai nilai pengungkapan risikon-

ya sebesar 83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi pula pengungkapan risiko perusahaan tersebut semakin tinggi.

Hasil pengujian ukuran dewan komisaris didapatkan nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 maka H₂ diterima, dengan diterimanya variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini menandakan bahwa semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka diprediksi memiliki insentif lebih dalam mengawasi praktik pengungkapan risiko agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Mubarok (2013) dalam Wicaksono & Adiwibowo (2017)). Besarnya jumlah anggota dewan komisaris dalam pengawasan akan lebih optimal dan efektif terhadap tingkat pengungkapan risiko yang lebih informatif. Sedangkan ukuran dewan komisaris yang lebih sedikit akan kekurangan *power* yang dapat menekankan manajemen agar mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan *monitoring* yang dilakukan akan kurang efektif.

Hasil pengujian kepemilikan saham publik didapatkan nilai signifikan sebesar 0,207 > 0,05 maka H₃ ditolak, ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PJOK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, hal tersebut mengharuskan bank umum konvensional wajib mengungkapkan risiko secara transparan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan publik yang besar

maupun yang kecil. Menurut Sholikhah & Sari (2020) menyatakan bahwa perusahaan perbankan merupakan jenis perusahaan yang harus mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga harus dapat memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan agar berkenan menjaga investasinya dalam perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan risiko menjadi hal yang wajib bagi perusahaan.

Hasil pengujian jumlah rapat dewan komisaris didapatkan nilai signifikan sebesar $0,632 > 0,05$ maka H_4 ditolak, jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan risiko perusahaan perbankan tidak hanya kebijakan dewan komisaris saja, namun juga jajaran direksi lainnya. Sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar hasil pengujian yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut i) variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,447 lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang berarti variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko; ii) variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau 5%, yang berarti variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko; iii) variabel kepemilikan saham publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,207 lebih besar 0,05 atau 5%, yang berarti variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko; dan iv) variabel jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,632 lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang berarti variabel jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko.

Saran

Berdasar hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengungkapan risiko yang baik akan memberikan gambaran umum kepada para pemangku kepentingan tentang transparansi laporan keuangan perusahaan, meningkatkan kualitas keter-

bukaan perusahaan untuk membantu arus dan calon investor dalam penilaian yang tepat dan keputusan ekonomi. Penelitian ini berusaha memberikan masukan untuk kebijakan bagi manajemen dan pengawas perbankan guna mendukung pengungkapan risiko pada para pemangku kepentingan perusahaan, maka variabel yang berpengaruh signifikan yaitu ukuran dewan komisaris perlu dicermati dan diperhatikan, mengingat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu profitabilitas, kepemilikan saham publik dan jumlah rapat dewan komisaris tetap perlu menjadi perhatian karena pada beberapa penelitian sebelumnya variabel tersebut mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, H. B. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan pada Industri Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 46–57.
- Ellili, N. O. D., & Nobanee, H. 2017. Corporate risk disclosure of Islamic and conventional banks. *Banks and Bank Systems*, 12(3), 247–256.
- Endah, S., & Meilani, R. 2017. Determinan Financial Risk Disclosure: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia Index periode 2014-2016, 19(2), 119–134.
- Meilody, J., & Suhendah, R. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 201–209.
- Putri, A. A., & Nurbaiti, A. 2019. Analisis Determinan Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 2873–2880.
- Putri, I. S., & TDKW, Y. 2020. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko pada Bank Syariah. *Business Innovation & Entrepreneurship*

Journal, 2(1), 41–47.

- Ramadhani, N., Sari, R. N., & Darlis, E. 2015. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Risiko Perusahaan (Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftar pada BEI Indeks KOMPAS 100 Tahun 2010 s.d 2012). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 18–32.
- Suhardjanto, D., & Dewi, A. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(1), 105–118.
- Wicaksono, S. A., & Adiwibowo, A. S. 2017. Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi Empiriss pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015). *Journal Of Accounting*, 6(4), 1–14.